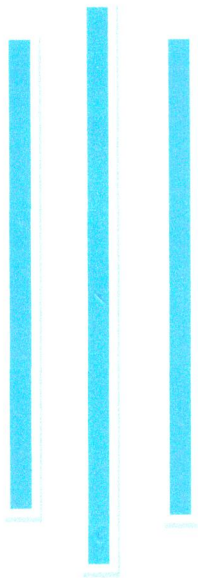


**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKjIP)
TAHUN 2019**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 23 November 2011 perihal Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011;
9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh No. 37 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Banda Aceh Tahun 2012 – 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019
- KEDUA** : Tujuan Penetapan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah memperoleh Informasi Kinerja yang Penting dan diperlukan dalam Penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 10 Februari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**




BUSTAML SH.

**Pembina Utama Muda /
NIP. 19630824 198703 1 004**

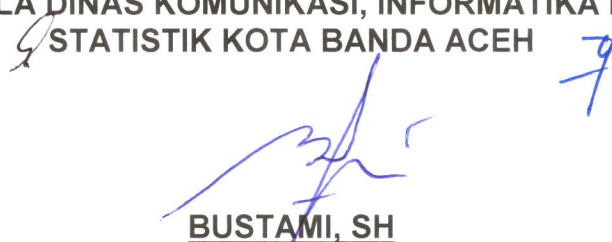
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T dengan rahmat dan hidayah-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran strategis serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Diskominfo melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah tercantum di dalam Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Tahun 2017-2022. Selain itu penyusunan LKjIP ini juga berpedoman dan mengacu pada Perencanaan Strategik dan Rencana Kinerja Tahun 2019.

Akhirnya LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh telah diupayakan sebaik mungkin di dalam penyajiannya walaupun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan. LKjIP ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan pertanggungjawaban di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

Banda Aceh, 10 Februari 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH



BUSTAMI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19630824 198703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Maksud dan Tujuan 1

 1.3. Aspek Strategis Organisasi 2

 1.4. Gambaran Umum 3

 1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 2.1. Rencana Strategis 9

 2.2. Visi dan Misi 10

 2.3. Tujuan dan Sasaran 11

 2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 12

 2.5. Rencana Kinerja 13

 2.6. Penetapan Kinerja 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

 3.1. Capaian Kinerja Organisasi 17

 3.1.1.. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

 Sasaran Strategis 18

 3.1.2.. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya 28

 3.2. Realisasi Anggaran 29

BAB IV PENUTUP 33

LAMPIRAN

Ikhtisar Eksekutif

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh kesimpulan pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya. Hal ini sejalan dengan tujuan dan fungsi utama Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh telah tersusun, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh dan untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah 8 tahun 2006 sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Di dalam LKjIP ini menguraikan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dari masing-masing program dan kegiatan secara menyeluruh yang telah dilaksanakan selama Tahun 2019 serta beberapa pokok permasalahan dalam pencapaian sasaran, baik kendala dan hambatan maupun strategi pemecahan masalahnya. Simpulan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Tahun 2019 sebanyak 2 Sasaran dengan 6 Indikator Kinerja Sasaran.
2. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut telah dilaksanakan 8 program dan 21 kegiatan.
3. Dalam pencapaian 2 sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 seluruh program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan rata-rata capaian 97,63%.
4. Dana yang digunakan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut bersumber dari APBK Kota Banda Aceh dengan anggaran sebesar Rp 5.590.180.559,- dengan realisasi sebesar Rp 6.006.661.471,- atau (108,52%) melalui Belanja Langsung (Rp 3.162.324.983,- dengan realisasi sebesar Rp 3.087.432.475,- atau 97,63%) dan Belanja Tidak langsung (Rp 2.427.855.576,- dengan realisasi sebesar Rp 2.979.228.996,- atau 122,71%) untuk pelaksanaan program dan kegiatan dan beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi melalui berbagai strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan.

5. Secara umum kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam pencapaian sasaran strategis telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh merupakan hasil penilaian yang obyektif terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang ada sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Dalam penyusunan LKjIP ini masih banyak ditemukan kelemahan, kekurangan sehingga masih perlu mendapat kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP dimasa yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh dan Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh. Diskominfotik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Banda Aceh

Dalam rangka terselenggaranya *good governance* diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi. Salah satu media untuk mewujudkan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan *good governance* ini adalah dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Diskominfotik adalah media atau dokumen akuntabilitas yang dapat dipakai oleh Diskominfotik untuk melaksanakan kewajiban dan sebagai dokumen pertanggungjawaban Diskominfotik kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) tentang pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Diskominfotik yang merupakan hasil perumusan dari rangkaian proses sistematis dan berkelanjutan yang terkait dengan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kota (SKPD/SKPK) dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) penting dari masing-masing program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan

pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai titik tolak dan bahan analisis dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di tahun-tahun berikutnya. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan dan fungsi utama LKjIP Diskominfo yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
2. Mendorong Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan kinerjanya pada tahun-tahun yang akan datang baik dari segi kebijakan, prosedur, pelaporan, pelaksanaan program kegiatan, dan
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banda Aceh.
5. Sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai alat untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi;
6. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta mencari solusi untuk melakukan pencegahan (*prevention*) terhadap hal-hal yang dapat menghambat tujuan dan sasaran tersebut. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh yaitu :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat bidang komunikasi, diklat kepemimpinan, dan teknis lainnya.
2. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat. Berbasis IT serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan

1.4. Gambaran Umum

A. Kedudukan

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang merupakan *leading sector* penyelenggaraan pelayanan komunikasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh mempunyai wewenang :

- 1) Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- 2) Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem informatika;

- 3) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam kota Banda Aceh di bidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang pengembangan sistem informatika;
- 4) Pembinaan teknis dibidang bidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang pengembangan sistem informatika;
- 5) Pengawasan dan pengendalian dibidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang pengembangan sistem informatika;
- 6) Penelitian dibidang komunikasi dan telekomunikasi serta bidang pengembangan sistem informatika;
- 7) Pelaksanaan kerjasama, pembinaan dan pelaksanaan search and rescue di Kota Banda Aceh;
- 8) Pembinaan UPTD ; dan
- 9) Melakukan kegiatan lain dalam Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik sesuai dengan petunjuk Walikota.

C. Susunan Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh, merupakan suatu lembaga pemerintah kota yang melaksanakan kegiatan di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Banda Aceh Nomor: 54 Tahun 2016 tanggal 20 Desember 2016, tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset, dan
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Informasi dan Opini Publik, dan
 - b. Seksi Penyediaan Konten dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik.
- 4) Bidang E-Government, membawahi
 - a. Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan
 - b. Seksi Pengelolaan Aplikasi, Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian
- 5) Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City, membawahi :
 - a. Seksi Layanan Hubungan Media, dan

- b. Seksi Penguatan Sumber Daya Komunikasi dan Ekosistem Smart City.
- 6) Bidang Statistik, membawahi :
 - a. Seksi Survei Sektoral, dan
 - b. Seksi Kompilasi dan Publikasi Produk Sektoral.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh terlampir.

D. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai faktor penunjang sumber daya manusia (SDM), jumlah pegawai Diskominfotik Kota Banda Aceh dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH	Ket
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
PNS					
1	IV/c	1	-	1	
2	IV/b	-	-	-	
3	IV/a	6	1	7	
4	III/d	5	3	8	
5	III/c	3	1	4	
6	III/b	1	5	6	
7	III/a	1	5	6	
8	II/d	-	-	-	
9	II/c	2	-	2	
10	II/b	-	-	-	
11	II/a	-	-	-	
12	I/d	-	-	-	
Jumlah PNS		19	15	34	

Non PNS					
13	Peg. Kontrak	16	5	21	
Jumlah Non PNS		16	5	21	
Jlh PNS + Non PNS		35	20	55	

(Diskominfotik, Data Desember 2019)

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Diskominfotik Berdasarkan Jabatan/Eselonering

No.	Jabatan	Eselonering	Jumlah orang
1	Kepala Dinas	II. b	1
2	Sekretaris	III. a	1
3	Kepala Bidang	III. b	4
4	Kasi/Kasubbag	IV. a	11
5	Kepala UPTD	IV. a	0
6	Kepala Tata Usaha (UPTD)	IV. b	0
	Jumlah	16	

(Diskominfotik, Data Desember 2019)

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Diskominfotik Menurut Tingkat Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah orang
1	S 2	6
2	S 1	19
3	D IV	0
3	D III	1
4	SLTA/Sederajat	8
5	SLTP/Sederajat	0
6	SD/Sederajat	-
	Jumlah	34

(Diskominfotik, Data Desember 2019)

**Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Diskominfo Menurut
Jenjang Pendidikan Struktural**

No.	Tingkat Jenjang Pendidikan Struktural	Jumlah orang
1	S pamen / PIM - II	1
2	S pama / PIM - III	5
3	Adum / PIM - IV	9
Jumlah		15

Rincian barang-barang inventaris atau perlengkapan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dapat dilihat pada daftar Tabel 1.5.

**Tabel 1.5 Rekapitulasi Aset Diskominfo Kota Banda
Aceh Kota Banda Aceh**

NO	Jenis Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4 (Mini Bus)	3
2	Earphone Wireless	5
3	Harddisk External 3.5 Inch - 2TB	8
4	Hardisk Repositori	1
5	Komputer	12
6	Accesspoint	1
7	Almari	6
8	Brangkas	1
9	Kursi Kantor	28
10	Laptop	8
11	LCD Console	1
12	Meja Kantor	29
13	Memori Stick	2
14	Mesin Absensi	1
15	Baterai Tester	1
16	CO ₂	1
17	Tangga	1
18	Power Supply	12
19	Printer	4
20	Printer Gaji	1
21	Proyektor - HD	1

22	Router board 450	5
23	Sofa	1
24	Tripod Camera	1

1.5. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh pada Tahun 2019. Capaian kinerja (*performance results*) 2019 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian LKjIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat diilustrasikan dalam bagan berikut ini.

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Aspek Strategis Organisasi
- 1.4 Gambaran Umum
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Visi dan Misi
- 2.3. Tujuan dan Sasaran
- 2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
- 2.5. Rencana Kinerja
- 2.6. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan Diskominfo dan akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Diskominfo (Renja SKPD) dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022, sehingga Renstra Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 – 2022.

Rencana strategis SKPD disusun untuk menindaklanjuti program RPJMD ke dalam program dan kegiatan SKPD selama lima tahun. Program dan kegiatan dalam renstra SKPD terkait dengan sasaran RPJMD, dengan demikian renstra SKPD tidak terlepas dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* layanan. Adapun strategi yang ditempuh oleh Diskominfo adalah :

1. Meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti diklat bidang komunikasi, diklat kepemimpinan, diklat teknis lainnya;
2. Meningkatkan penyediaan data statistik kota;
3. Meningkatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu, dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis IT serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil dan digunakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta pencapaian visi dan misi SKPD. Kebijakan yang dilakukan Diskominfo setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:

1. Mengikut sertakan aparatur dalam segala bentuk Bimibingan Teknis (Bimtek) guna meningkatkan kualitas SDM dan pelayanan publik;
2. Melakukan koordinasi, penerapan Informasi Teknologi (IT) dan kerja sama dengan instansi terkait serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap semua kegiatan pelaksanaan pembangunan, dan
3. Menjalin kerjasama dan koordinasi intens dengan semua *stakeholder* dibidang penyediaan data dan informasi statistik.

2.2. Visi dan Misi

A. VISI

Perumusan Visi dan Misi pembangunan jangka menengah merupakan tahap penting di dalam penyusunan dokumen Renstra. Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi yang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh inginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Visi dan Misi Diskominfo merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh dalam mencapai kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Beranjak dari hal-hal yang disebutkan diatas, Visi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah :

**“TERWUJUDNYA PENYELENGGARAAN TIK MENUJU
MASYARAKAT BANDA ACEH GEMILANG YANG ISLAMI”**

B. Misi

Adapun Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan Kapasitas SDM bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika
- 3) Menyediakan data statistik yang berkualitas dan terintegrasi
- 4) Membangun sistim aplikasi SKPK yang berkualitas dan terintegrasi
- 5) Menjadikan data sebagai sumber berita dan informasi
- 6) Meningkatkan kualitas layanan publik yang profesional berbasis TIK

2.3. Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

Tujuan Strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Dengan diformulasikan tujuan strategik ini maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat dengan tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi tuntutan visinya. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan adanya penetapan tujuan akan dapat diletakkan kerangka prioritas untuk menentukan arah, guna pencapaian keberhasilan sebagai motivator dan pendorong bagi kinerja yang memuaskan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Adapun yang menjadi tujuan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah Tersedianya Data dan Informasi yang Berkualitas dan Terintegrasi dalam Kota Banda Aceh.

B. Sasaran

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan suatu tujuan yang jelas yang dilandasi dengan visi dan misi yang jelas. Adapun yang menjadi sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi, dan
- 2) Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik

Tujuan dan Sasaran dari Diskominfo bisa dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo (IKU)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
		2 Meningkatkan kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	Persentase 1 website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			Persentase 2 permintaan informasi publik yang dapat dilayani	$\frac{\text{Jumlah permohonan informasi publik yang direspon}}{\text{Jumlah informasi yang dimohon}} \times 100\%$	90%	92%	94%	95%	97%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			Persentase 3 aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan/ aspirasi masyarakat ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan/ aspirasi masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	90%	92%	94%	95%	97%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			4 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai kematangan indikator SPBE Kota Banda Aceh X bobot aspek penilaian SPBE	2,65 (CC)	2,7 (CC)	2,8 (CC)	2,9 (CC)	3 (B)	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Tahunan
			5 Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah aplikasi yang dimiliki seluruh SKPD}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG E-GOV	Laporan Semesteran Tahunan

(Renstra dan IKU Diskominfo)

2.4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

Cara mencapai tujuan dan sasaran adalah diantaranya melalui suatu atau beberapa program yang didukung oleh kegiatan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi Perangkat Daerah dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari atau mengacu kepada program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada rancangan Renja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa

Adapun program Diskominfo yang telah dijabarkan dalam rencana kerja setiap tahunnya dalam bentuk berbagai kegiatan yang terukur dari pembiayaan APBD adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA & Listrik
 - 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - 1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 1.4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 1.6. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - 1.7. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 1.8. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 2.1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2.2. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
 - 2.3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 3.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
4. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- 4.1. Kegiatan Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah
5. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
 - 5.1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi
 - 5.2. Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
 - 5.3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
 - 5.5. Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi
6. Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
 - 6.1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
 - 7.1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
8. Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
 - 8.1. Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah
 - 8.2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
 - 8.3. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat

2.5. Rencana Kinerja

Penyusunan Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan indikator tujuan/sasaran beserta targetnya yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan oleh Diskominfo Kota Banda Aceh pada tahun 2019 yang memuat sasaran strategis, indikator tujuan/sasaran kinerja dan target atas seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran yang dicapai melalui program dan kegiatan yang direncanakan. Rencana Kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh tahun 2019 bisa dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfo (IKU)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	10%
		2 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	1 Persentase website OPD yang aktif	65%
			2 Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani	92%

			3	Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti	92%
			4	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,7 (CC)
			5	Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi	10%

2.6. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja adalah merupakan tekad janji yang akan diwujudkan oleh pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya atau merupakan gambaran capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu unit kerja dalam suatu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun Penetapan Kinerja Diskominfotik Kota Banda Aceh tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3. Sementara itu, Program dan Kegiatan yang secara langsung mengacu kepada pemenuhan target penetapan kinerja bisa dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.3 Penetapan Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	10%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Website OPD yang Aktif	65%
		Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani	92%
		Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi Suwarga yang Dapat Ditindaklanjuti	92%
		Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,7 (CC)
		Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi	10%

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan yang Mengacu Kepada Pemenuhan Target Penetapan Kinerja

NO	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah	82.407.380
2	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	34.771.790
		Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	21.397.600
		Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	568.950.000
		Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	-
3	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	-
4	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	324.654.800
5	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	646.069.139
		Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	322.183.200
		Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	66.607.150

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh telah melakukan pengukuran dan penilaian kinerja yang mengacu kepada Dokumen Perjanjian Kinerja Diskominfo Tahun 2019. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur ketercapaian kinerja yang telah disepakati dimana hal ini akan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan atau sasaran strategis Diskominfo Kota Banda Aceh. Pencapaian tujuan atau sasaran strategis Diskominfo diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang memiliki target yang harus dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi target kinerja dari indikator kinerja tersebut pada tahun 2019. Capaian kinerja Diskominfo pada tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu	Persentase	10%	10%	100%
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik	Persentase Website OPD yang Aktif	Persentase	65%	65%	100%
		Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani	Persentase	92%	92%	100%
		Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi SUWARGA yang Dapat Ditindaklanjuti	Persentase	92%	92%	100%

	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	2,7	2,24	82.96%
	Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi	Persentase	10%	10%	100%

Pada Tabel 3.1 terdapat dua sasaran strategis yang harus dicapai oleh Diskominfo, dimana pada sasaran strategis 1 terdapat 1 indikator kinerja yang pada tahun 2019 mencapai target 100%. Namun pada sasaran strategis yang kedua dimana terdapat 5 indikator kinerja dimana 4 indikator mencapai target (100%) namun terdapat satu indikator yang tidak mencapai target (82,96%). Tidak tercapainya target pada indikator ini disebabkan oleh beberapa hal.

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

A. Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi

Tolok ukur tercapainya Sasaran Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi diukur dengan 1 indikator yaitu Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan Tepat Waktu. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu	5%	10%	10%	100%	25%	40%

Persentase capaian realisasi target kinerja dihitung dengan formula $\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$ dan melihat kepada pencapaian atau realisasi kinerja pada tahun 2019 yang dibagi dengan target yang sudah ditetapkan, indikator kinerja ini sudah mencapai target realisasi kinerja yang diharapkan yaitu 10%.

Capaian target kinerja pada tahun 2018, Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu adalah 5% dimana sesuai dengan target yang tercantum pada renstra Diskominfo. Sementara capaian target kinerja pada tahun 2019 yang sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo yaitu 10%.

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai angka pemenuhan sebanyak 40%.

Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu disebabkan oleh tercapainya penyediaan data set yang diharapkan dan juga terupdatenya data statistik sektoral, dimana penanggung jawab dari target ini ada pada bidang Statistik pada Diskominfo. Oleh sebab itu, bidang terkait harus mampu untuk terus meningkatkan kualitas penyediaan data statistik sektoral yang berkualitas dan selalu *update* dan tepat waktu serta mampu terus bersinergi dengan para *stakeholder* data statistik, baik di dalam lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, maupun dengan pihak lainnya.

Sementara itu di dalam mencapai target kinerja pada sasaran Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu pada Tahun 2019 didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah yang memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah dimana tingkat pencapaian dari keluaran dan anggarannya mencapai angka 99.99%. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Adapun kendala yang dihadapi di dalam pencapaian indikator kinerja adalah masih belum baku dan ditetapkannya pengelola data statistik serta

bentuk data statistik yang digunakan di Lingkungan Kota Banda Aceh sehingga masih ada benturan yang terjadi diantara Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) yang menjadi sumber data dengan Diskominfo sebagai pengelola data. Untuk mengatasi hal ini sebaiknya dilakukan pembakuan bentuk data statistik yang digunakan serta ditetapkan Diskominfo sebagai pengelola data.

Tabel 3.3 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 1

N O	Sasaran Strategis	Tersedianya Data Statistik Sektoral yang Berkualitas dan Terintegrasi			Satuan		Persentase	
	Indikator Kinerja	Persentase Data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh Terupdate dan tepat Waktu			Target		10%	
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggaran	Triwulan IV Oktober - Desember			
					Rp		%	
					T	R	T	R
1	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	82.407.380	Pengolahan, updating, dan analisis data dan statistik daerah	82.407.380	82.407.380	82.397.380	100	99,99

(RKPK Banda Aceh Tahun 2019)

B. Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik

Tolok ukur tercapainya Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik diukur dengan 5 (lima) indikator yaitu Persentase Website OPD yang Aktif, Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani, Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi SUWARGA yang Dapat Ditindaklanjuti, Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi. Pencapaian kinerja dari indikator ini bisa dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019 Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Baseline Tahun 2018	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap Target 2022 (%)
			Target	Realisasi	Persentase Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase Website OPD yang Aktif	65%	65%	65%	100%	75%	87%
2	Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani	90%	92%	92%	100%	95%	97%
3	Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi Suwarga yang Dapat Ditindaklanjuti	90%	92%	92%	100%	95%	97%
4	Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,65 (CC)	2,7 (CC)	2,24 (CC)	82,96%	3 (CC)	74,67%
5	Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi	5%	10%	10%	100%	20%	50%

Pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik didukung oleh 5 (lima) indikator dimana hanya terdapat satu indikator tujuan/sasaran yang tidak mencapai target. Rincian pencapaian target sasaran melalui indikator sasaran ini dapat dijelaskan sebagai berikut,

1. Persentase Website OPD yang Aktif sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu sebesar 65%, dimana angka realisasi pencapaian dari website OPD yang aktif adalah sebesar 65% dari semua website OPD yang ada di Kota Banda Aceh. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula $\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$. Angka ini sama daripada pencapaian kinerja pada Tahun 2018 dimana Persentase

Website OPD yang Aktif adalah sebanyak 65% namun sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Website OPD yang Aktif sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai angka 87%. Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Website OPD yang Aktif disebabkan oleh perhitungan jumlah website SKPD atau OPD yang terdaftar pada domain resmi Kota Banda Aceh yang aktif di dalam memberikan berita terkait sudah mencapai target yang diharapkan. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu diharapkan Bidang PIP mampu untuk terus memonitor, mengelola dan berkoordinasi dengan SKPD/OPD sehingga informasi publik dapat rutin ditampilkan dan dibagikan melalui website SKPD/OPD sehingga jumlah persentase website SKPD/OPD yang aktif pada tahun berikutnya semakin naik. Selain itu koordinasi dan inisiasi serta keaktifan dari setiap SKPD/OPD di Kota Banda Aceh juga sangat diharapkan di dalam menunjang pencapaian target sasaran kinerja ini.

2. Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu sebesar 92%, dimana angka realisasi pencapaian dari permintaan informasi publik yang dapat dilayani oleh Diskominfo adalah sebesar 92%. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula
$$\frac{\text{Jumlah permohonan informasi publik yang direspon}}{\text{Jumlah informasi yang dimohon}} \times 100\%.$$
 Angka ini sudah naik daripada pencapaian kinerja pada Tahun 2018 dimana Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani adalah sebanyak 90% sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai angka 97%. Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani disebabkan oleh perhitungan antara jumlah permohonan informasi publik yang masuk

dan diterima oleh Diskominfo dibandingkan dengan jumlah informasi yang mampu untuk direspon melalui bidang PIP sebagai penanggung jawab program dan kegiatan sudah sesuai dan tidak ada permohonan yang tidak dapat direspon. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) sebagai penanggung jawab. Oleh karena itu diharapkan Bidang PIP sebagai penanggung jawab diharapkan mampu untuk mampu merespon setiap permintaan informasi publik berdasarkan kriteria Informasi Publik yang telah ditetapkan. Selain itu pengelolaan informasi publik diharapkan semakin baik dan teratur sehingga memudahkan penanggung jawab di dalam merespon setiap permintaan Informasi dari publik dikarenakan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyediaan informasi dari pemerintah kota melalui kanal resmi maupun dari stakeholder rekanan pemerintah Kota Banda Aceh.

3. Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi Suwarga yang Dapat Ditindaklanjuti sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu sebesar 92%, dimana angka realisasi pencapaian dari Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi Suwarga yang Dapat Ditindaklanjuti oleh Diskominfo adalah sebesar 92%. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula

$$\frac{\text{Jumlah} \frac{\text{pengaduan}}{\text{aspirasi}} \text{ masyarakat ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah} \frac{\text{pengaduan}}{\text{aspirasi}} \text{ masyarakat yang masuk}} \times 100\%.$$

Angka ini sudah naik

daripada pencapaian kinerja pada Tahun 2018 dimana Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi Suwarga yang Dapat Ditindaklanjuti adalah sebanyak 90% sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi Suwarga yang Dapat Ditindaklanjuti sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai angka 97%. Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi Suwarga yang Dapat Ditindaklanjuti disebabkan oleh perhitungan antara jumlah pengaduan/aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah pengaduan/aspirasi masyarakat yang masuk dan

diterima oleh Diskominfo melalui aplikasi SUWARGA mampu direspon dengan baik oleh Diskominfo melalui Bidang Pengelolaan Informasi Publik (PIP) sebagai penanggung jawab. Jumlah ini diperoleh dari laporan bulanan dan tahunan yang diberikan oleh Bidang PIP. Oleh karena itu diharapkan Bidang PIP sebagai penanggung jawab diharapkan mampu untuk mampu merespon setiap Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi Suwarga yang masuk untuk dikelola dan disampaikan kepada pihak terkait. Dikarenakan Aplikasi Suwarga hanya menampung setiap aspirasi yang masuk namun setiap tindakan yang akan diambil dilakukan oleh dinas atau pihak yang berwenang, diharapkan Diskominfo terutama Bidang PIP untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan baik dengan pihak-pihak tersebut. Hal ini bertujuan agar penyaluran aspirasi masyarakat bisa langsung tepat tujuan dan sasaran. Selain itu diharapkan sosialisasi yang semakin intens tentang penggunaan aplikasi Suwarga kepada masyarakat Kota Banda Aceh dan sekitarnya, sehingga semakin banyak masyarakat yang mau untuk menggunakan aplikasi Suwarga ini. Hal ini juga akan selaras dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

4. Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik tidak mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu sebesar 2,7 (CC), dimana angka realisasi pencapaian dari Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Diskominfo adalah sebesar 2,24 (CC). Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula *Nilai Kematangan Indikator SPBE Kota Banda Aceh X Bobot Aspek Penilaian SPBE*. Angka ini menurun apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada Tahun 2018 dimana Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah 2,42 (CC) dan tidak sesuai dengan target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik sampai dengan tahun 2019 baru mencapai angka 74,67%. Tidak tercapainya target kinerja pada sasaran Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) disebabkan

oleh beberapa hal utama seperti belum lengkapnya dokumen pendukung SPBE Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh seperti *masterplan/blue print* SPBE Pemko, arsitektur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Kota serta minimnya Standar Operasional Prosedur (SOP) aplikasi-aplikasi yang digunakan pada SKPD/OPD di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini diperoleh dari laporan tahunan yang diberikan oleh Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab program dan kegiatan. Oleh karena itu diharapkan Bidang E-Government dan Bidang Hubungan Media dan Penyelenggaraan Smart City sebagai penanggung jawab untuk mampu melengkapi setiap dokumen yang diperlukan di dalam penilaian setiap indikator SPBE oleh Pemerintah Pusat, penetapan standar interoperabilitas data dan informasi antar layanan SPBE juga harus diperhatikan selain penetapan Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus dan Aplikasi Umum yang digunakan di dalam Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal lain yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di dalam mendukung peningkatan penilaian SPBE ini dengan memaksimalkan peran Tim Koordinasi SPBE Kota Banda Aceh. Tim Koordinasi SPBE ini diharapkan dapat berperan untuk merencanakan, menerapkan serta mengevaluasi pelaksanaan SPBE khususnya terkait dengan capaian dari setiap Domain, Aspek dan Indikator SPBE sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi sudah mencapai target yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 yaitu sebesar 10%, dimana angka realisasi pencapaian dari Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi oleh Diskominfo adalah sebesar 10%. Angka dan data ini diperoleh dengan perhitungan formula $\frac{\text{Jumlah aplikasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah aplikasi yang dimiliki seluruh SKPD}} \times 100\%$. Angka ini sudah naik daripada pencapaian kinerja pada Tahun 2018 dimana Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi adalah sebanyak 5% sesuai dengan

target yang tercantum pada Renstra Diskominfo. Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Diskominfo pada Tahun 2022, capaian target kinerja Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai angka 50%. Tercapainya target kinerja pada sasaran Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi disebabkan oleh perhitungan antara jumlah aplikasi yang terintegrasi dengan jumlah aplikasi yang dimiliki seluruh SKPD sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Jumlah aplikasi yang telah didata dan dilakukan proses integrasi ini diperoleh dari Bidang E-Government sebagai penanggung jawab yang berasal dari laporan semesteran dan tahunan yang diberikan oleh Bidang E-Government. Oleh karena itu Bidang E-Government sebagai penanggung jawab diharapkan mampu untuk terus melakukan proses survey agar jumlah aplikasi yang ada tetap terdata dengan baik sehingga memudahkan tim E-Government di dalam melakukan proses integrasi dari keseluruhan aplikasi yang saat ini dimiliki oleh SKPD/OPD lain. Proses integrasi ini secara tidak langsung akan berkaitan dengan meningkatnya nilai pemeringkatan SPBE Pemko Banda Aceh.

Sementara itu di dalam mencapai target kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik pada Tahun 2019 didukung oleh 3 (tiga) program yaitu Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa yang memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi dan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi, Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi yang memiliki 1 (satu) kegiatan yaitu Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi, dan Program Kerjasama Informasi dan Media Massa yang memiliki 3 (tiga) kegiatan yaitu Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah, Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat. Tingkat pencapaian masing-masing program dan kegiatan ini sangat baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Capaian Anggaran Pendukung Sasaran 2

N O	Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Teknologi Informasi dan Pengelolaan Informasi Publik			Satuan		Persentase dan Nilai	
	Indikator Kinerja	Persentase Website OPD yang Aktif			Target		65%	
		Persentase Permintaan Informasi Publik yang Dapat Dilayani					92%	
		Persentase Aspirasi Masyarakat Melalui Aplikasi Suwarga yang Dapat Ditindaklanjuti					92%	
		Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik					2,7 (CC)	
		Persentase OPD yang Aplikasinya Terintegrasi					10%	
	Program	Anggaran	Kegiatan	Anggara n	Triwulan IV Oktober - Desember			
				Rp		%		
				T	R	T	R	
1	Program Pengemb angan Komunika si, Informasi dan Media Massa	625.119.39 0	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	34.771.7 90	34.771.7 90	34.771.7 90	100	100
			Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	21.397.6 00	21.397.6 00	17.182.6 00	100	80,3
			Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	568.950. 000	568.950. 000	568.265. 204	100	99,88
2	Program Pengkajia n dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunika si	324.654.80 0	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	324.654. 800	324.654. 800	318.829. 800	100	98,21
3	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	1.034.859.4 89	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	646.069. 139	646.069. 139	625.159. 139	100	96,76
			Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	322.183. 200	322.183. 200	321.783. 200	100	99,88

			Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	66.607.150	66.607.150	62.507.150	100	93,84
--	--	--	---	------------	------------	------------	-----	-------

3.1.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Selain berupaya mencapai target kinerja dari dua sasaran Strategis seperti yang sudah dijelaskan di atas, Diskominfo Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah yang bertujuan untuk mewujudkan misi kelima Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yaitu untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dimana Diskominfo tentu harus mampu untuk menyesuaikan diri terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terus berkembang dengan pesat. Untuk menyesuaikan diri, Diskominfo tentu harus terus berkembang, harus melengkapi diri dengan sarana prasarana TIK yang memadai, memiliki manajemen data dan informasi yang berkualitas kinerja untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2019, Diskominfo juga memiliki dua peran yang harus dicapai yaitu mendukung Kota Banda Aceh sebagai salah satu dari 100 Kota dengan konsep pelayan Smart City dan juga berperan sentral di dalam meningkatkan Indeks Pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Banda Aceh.

Sampai dengan akhir tahun 2019, Diskominfo telah berhasil menyelesaikan Dokumen atau Buku Smart City yang akan menjadi panduan di dalam mewujudkan Banda Aceh sebagai Kota dengan konsep pelayanan Smart City. Sementara itu pencapaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh masih belum mencapai target yang sudah ditetapkan dengan nilai 2,24 (CC) dari target 2,7 (CC).

Sementara itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada tahun 2019, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Diskominfo seperti :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Diskominfo yang di dalam menunjang kinerja pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan
2. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) terutama tenaga ahli IT (*programmer, networker, analis*) yang dimiliki oleh Diskominfo
3. Masih belum baku dan tertatanya Standar Operasional Prosedur (SOP), regulasi dan aturan lainnya di dalam pelaksanaan tupoksi Diskominfo, seperti dokumen pendukung SPBE, Smart City, Statistik dan lain-lain
4. Terbatasnya plafon anggaran yang diberikan ke Diskominfo

Beberapa strategi atau upaya pemecahan masalah yang akan dilakukan oleh Diskominfo pada tahun kedepannya adalah,

1. Memaksimalkan plafon anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo yang bisa melalui sumber dana APBD, OTSUS, Hibah dan Migas
2. Memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan cara meningkatkan kemampuan melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan mencoba untuk membuka rekrutmen atau penerimaan tenaga ahli, terutama tenaga IT
3. Menyusun, menata dan membakukan SOP, regulasi atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfo

3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung Diskominfo pada Tahun 2019 adalah sebesar 97,63% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi Keuangan khusus Belanja Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2019 dapat dilihat dengan perincian pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Realisasi Keuangan Belanja Langsung Diskominfo Tahun 2019

No.	Program/Kegiatan		Alokasi Anggaran (DPPA) TA.2019	Realisasi Anggaran TA.2019	%
I	Pelayanan Adm Perkantoran		910.118.314	887.381.648	97,50
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	6.500.000	2.674.270	41,14
	2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.300.000	7.500.000	80,65
	3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	21.510.250	18.265.070	84,91
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.999.750	13.532.040	84,58
	5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	4.192.500	83,85
	6	Penyediaan Makanan dan Minuman	37.752.000	34.944.000	92,56
	7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	168996314	168.713.768	99,83
	8	Penyediaan Jasa Pendukung Tenaga Administrasi / Teknis	645.060.000	637.560.000	98,84
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		185.165.610	169.154.564	91,35
	1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	89.900.000	89.800.000	99,89
	2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ operasional	73.386.480	58.112.244	79,19
	3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	21.879.130	21.242.320	97,09
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	-	-
	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	-	-
IV	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		82.407.380	82.397.380	99,99
	1	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	82.407.380	82.397.380	99,99

V	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa		625.119.390	620.219.594	99,22
	1	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	34.771.790	34.771.790	100
	2	Pembinaan dan Pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	21.397.600	17.182.600	80
	3	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	568.950.000	568.265.204	100
	4	Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi	-	-	-
VI	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi		-	-	-
	1	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	-	-	-
VII	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi		324.654.800	318.829.800	98,21
	1	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	324.654.800	318.829.800	98,21
VIII	Program Kerjasama Informasi dan Media Masa		1.034.859.489	1.009.449.489	97,54
	1	Penyebarluasan informasi Pembangunan Daerah	646.069.139	625.159.139	96,76
	2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	322.183.200	321.783.200	99,88
	3	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat	66.607.150	62.507.150	93,84
TOTAL			3.162.324.983	3.087.432.475	97,63

Hampir semua realisasi keuangan khusus Belanja Langsung program dan kegiatan yang dilakukan Diskominfo pada tahun 2019 berada pada angka 90% ke atas. Serapan anggaran terkecil berada pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan angka 91,35%. Sedangkan penyerapan anggaran terbesar berada pada Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah dengan angka 99,99%.

Ada beberapa program dan kegiatan yang awalnya tercantum di dalam Rencana kerja Tahun 2019 yang pada pengerjaannya tidak dapat dilaksanakan

dikarenakan adanya pergeseran anggaran kepada program dan kegiatan prioritas. Hal ini terjadi pada program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi dengan kegiatan Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi, serta satu kegiatan yaitu kegiatan Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi pada Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa. Selain itu pengalihan anggaran ini dilakukan mengingat anggaran yang diberikan kepada Diskominfo juga terbatas.

Usaha-usaha perbaikan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi , tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dengan menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu, mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat. Selanjutnya dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan meningkatkan profesionalisme kerja secara terus menerus. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh dapat terus ditingkatkan.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Tahun 2019 ini merupakan dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan manajemen strategis pembangunan berbasis kinerja pada Diskominfo terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam pemenuhan visi misi Diskominfo dan juga Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh.

Secara keseluruhan pengukuran kinerja Diskominfo Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 sudah baik. Hal ini terlihat pada serapan anggaran perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Belanja Tidak Langsung yang mencapai angka 97,63% dari total Belanja Langsung sebanyak 3.162.324.983,-. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pergeseran skala prioritas, sehingga program dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat anggaran Diskominfo yang terbatas. Selain itu terdapat satu indikator kinerja yang tidak tercapai yaitu Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang hanya mencapai angka 2,24 (CC) dari Target 2,7 (CC).

Langkah yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah memaksimalkan plafon anggaran yang diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK yang dimiliki oleh Diskominfo, memaksimalkan SDM yang dimiliki dengan cara meningkatkan kemampuan melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan mencoba untuk membuka rekrutmen atau penerimaan tenaga ahli, terutama tenaga IT, dan menyusun, menata dan membakukan SOP, regulasi atau prosedur teknis lainnya yang bisa menunjang tupoksi Diskominfo.

Demikian LKjIP Diskominfo Kota Banda Aceh ini kami susun semoga bisa menjadi bahan evaluasi bersama demi peningkatan kinerja Organisasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Banda Aceh.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

SKPD : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
Tahun : 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1.	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	10%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan informasi publik	2.1.	Persentase website OPD yang aktif	65%
		2.2.	Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani	92%
		2.3.	Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dapat ditindaklanjuti	92%
		2.4.	Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,7 (CC)
		2.5.	Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi	10%

Program		Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 910.118.314	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 185.165.610	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp -	
4	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Rp 82.407.380	
5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Rp 625.119.390	
6	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp 324.654.800	
7	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Rp -	
8	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Rp 1.034.859.489	
JUMLAH		Rp 3.162.324.983	

WALIKOTA BANDA ACEH

H. AMINULLAH USMAN, SE.Ak, MM

Banda Aceh, 3 Januari 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH

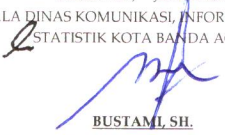
BUSTAM, SH.
Pembina Utama Muda
Nip.19630824 198703 1 004

RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2019

Unit Kerja : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

No	Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
1	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur dan Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan publik	100%	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	75.426.000	
						Keluaran	: Jumlah waktu jasa komunikasi, SDA, dan Listrik yang disediakan	Bln	12	
						Hasil	: Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	9.300.000	
						Keluaran	: Jumlah waktu jasa kebersihan kantor yang disediakan	Bln	12	
						Hasil	: Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan alat tulis kantor	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	21.510.250	
						Keluaran	: Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	Jenis	38	
						Hasil	: Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	15.999.750	
						Keluaran	: Jumlah jenis cetak dan penggandaan yang disediakan	Jenis	7	
						Hasil	: Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	5.000.000	
						Keluaran	: Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	6	
						Hasil	: Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan makanan dan minuman	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	37.752.000	
						Keluaran	: Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	Porsi	2904	
						Hasil	: Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	40	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	110.000.000	
						Keluaran	: Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	Laporan	20	
						Hasil	: Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	680.160.000	
						Keluaran	: Jumlah waktu jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang disediakan	Bln	12	
						Hasil	: Tingkat pelayanan administrasi perkantoran yang maksimal	%	100	
					Meningkatnya kelancaran tugas-tugas kantor	100%	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan peralatan gedung kantor	Masukan	
		Keluaran	: Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	Jenis					6	
		Hasil	: Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana	%					100	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan				(Rp)	65.652.400	
			Keluaran	: Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas/ Operasional yang dilaksanakan				Kali	48	
			Hasil	: Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana				%	100	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan				(Rp)	21.879.130	
			Keluaran	: Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor yang dilaksanakan				Kali	20	
			Hasil	: Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana				%	100	
									180.570.280	
		Tersedianya pakaian dinas harian	100%	Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	17.050.000	
						Keluaran	: Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan	Stel	31	
						Hasil	: Tingkat Keseragaman Pakaian dinas aparatur	%	100	
									17.050.000	
		2	Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan Pembangunan dan pelayanan publik secara terpadu dengan tertib administrasi yang transparan, akuntabel dan cepat berbasis IT	Jumlah open data dalam setahun	100%	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah	Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah	Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	
Keluaran	: Jumlah dokumen data statistik yang diolah, diupdate dan dianalisis							Dok	1	
Hasil	: Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu							%	5	
									82.407.380	
Terlaksananya pembinaan jaringan komunikasi dan informasi	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi		Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	34.771.790	
						Keluaran	: Jumlah pembinaan warnet yang dilaksanakan	Kali	42	
						Hasil	: Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani	%	90	
				Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi		Masukan	: Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	21.397.600	
						Keluaran	: Informasi yang dibina dan dikembangkan	Orang	30	
						Hasil	: Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani	%	90	

No	Sasaran			Program	Kegiatan					Ket
	Uraian	Indikator	Target		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Target		
		Tersedia sarana dan prasarana informatika	100%		Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	375.850.000		
		Keluaran : Jumlah sarana dan prasarana informatika yang tersedia				Unit	8			
		Hasil : Nilai Pemeringkatan Pemerintah Berbasis Elektronik				CC	2,65			
		Terlaksananya pengembangan komunikasi dan informasi			Perencanaan dan Pengembangan kebijakan Komunikasi dan Informasi	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	31.904.340		
						Keluaran : Jumlah kegiatan Perencanaan komunikasi dan informatika yang dilakukan	Keg	1		
						Hasil : Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi	%	5		
		Jumlah aspirasi masyarakat dan perkembangan Kota Banda Aceh yang tertampung dalam tabloid SIKWADARA		Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	192.447.300		
						Keluaran : Jumlah kegiatan penelitian penyusunan data base informasi dan komunikasi yang dilakukan	Keg	1		
						Hasil : Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti	%	90		
		Jumlah wartawan pemuda yang mendapat pelatihan pers		Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	18.087.600		
						Keluaran : Jumlah SDM yang telah dilatih dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Orang	30		
						Hasil : melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti	%	90		
		Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah		Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	852.359.805		
						Keluaran : Jumlah kegiatan informasi pemerintah yang disampaikan kepada masyarakat	Keg	5		
						Hasil : Persentase website OPD yang aktif	%	65		
		Jumlah sosialisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bentuk lomba KIG			Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	172.183.200		
						Keluaran : Jumlah pembinaan terhadap kelompok informasi gampong yang dilaksanakan	Kali	6		
						Hasil : Persentase website OPD yang aktif	%	65		
					Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Masukan : Jumlah dana yang dibutuhkan	(Rp)	66.607.150		
						Keluaran : Jumlah penyuluhan KIG yang dilaksanakan	Kali	6		
						Hasil : Persentase website OPD yang aktif	%	65		
								1.091.150.155		
								3.000.784.445		

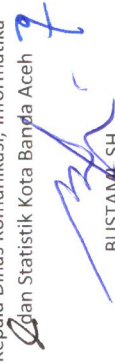
Banda Aceh, Januari 2019
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH

BUSTAM L. S.H.
Pembina Utama Muda/ NIP. 19630824 198703 1 004

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Diskominfotik (IKU)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KRITERIA PENILAIAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					TANGGUNG JAWAB	SMBER DATA
					2018	2019	2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tersedianya data dan Informasi yang berkualitas dan terintegrasi dalam kota banda aceh	1 Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah data set yang tersedia}}{\text{Jumlah data set yang diharapkan}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG STATISTIK	Laporan Tahunan
			1 Persentase website OPD yang aktif	$\frac{\text{Jumlah website SKPD yang update dalam satu tahun}}{\text{Jumlah seluruh website SKPD}} \times 100\%$	65%	65%	70%	75%	80%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			2 Persentase permintaan informasi publik yang dapat ditayani	$\frac{\text{Jumlah permohonan informasi publik yang direspon}}{\text{Jumlah informasi yang dimohon}} \times 100\%$	90%	92%	94%	95%	97%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			3 Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan aspirasi}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk}} \times 100\%$	90%	92%	94%	95%	97%	BIDANG PIP	Laporan Bulanan dan Tahunan
			4 Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai kematangan indikator SPBE Kota Banda Aceh X bobot aspek penilaian SPBE	2,65 (CC)	2,7 (CC)	2,8 (CC)	2,9 (CC)	3 (B)	BIDANG E-GOV / BIDANG SMART CITY	Laporan Tahunan
			5 Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi	$\frac{\text{Jumlah aplikasi yang terintegrasi}}{\text{Jumlah aplikasi yang dimiliki seluruh SKPD}} \times 100\%$	5%	10%	15%	20%	25%	BIDANG E-GOV	Laporan Semesteran dan Tahunan

Banda Aceh, 19 April 2018

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh



BUSTAM, SH.

Nip. 19630824 198703 1 004

RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
TAHUN 2017 S/D 2022

Instansi : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh
Visi : Terwujudnya Kota Banda Aceh GEMILANG dalam bingkai Syariah
Misi : 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

No	Tujuan	Sasaran		Kebijakan	Program
		Uraian Sasaran	Indikator Sasaran		
1	1.1 Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan berintegrasi dalam Kota Banda Aceh	1.1.1 Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	- Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	1.1.1.1 UU No. 16 Tahun 1997 Tentang Statistik	1.1.1.1.1 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
2	2.1 Tersedianya data dan informasi yang berkualitas dan berintegrasi dalam Kota Banda Aceh	2.1.1 Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	- Persentase website OPD yang aktif	2.1.1.1 UU No. 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	2.1.1.1.1 Program Kerjasama Informasi dan Media Masa
			- Persentase aspirasi masyarakat melalui aplikasi suwarga yang dpt ditindaklanjuti	2.1.1.2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	
			- Persentase permintaan informasi publik yang dapat dilayani	3.1.1.1 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	3.1.1.1.1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa
				4.1.1.1 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	4.1.1.1.1 Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi
				4.1.1.2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	4.1.1.1.2 Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
			- Nilai Pemeringkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik	5.1.1.1 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	
			- Persentase OPD yang aplikasinya terintegrasi	5.1.1.2 UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	5.1.1.1 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Masa

Banda Aceh, 19 April 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH
BUSTAMI, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 19630824 198703 1 004

POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

